BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan intern pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan sudah baik. Artinya, bahwa secara teori dan berdasarkan PP.No.60 tahun 2008, keseluruhan pengawasan intern pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung telah dilakukan secara efektif dan efisien dalam kegiatan operasionalnya, handal dalam penyajian laporan keuangan dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada. Hal ini ditunjukan oleh dimensi karateristik lingkungan pengendalian, karakteristik aktivitas pengendalan, karakteristik informasi dan komunikasi serta karakteristik monitoring. Sedangkan berdasarkan dimensi penilaian resiko, dapat dikatakan merupakan dimensi dengan persentase paling rendang dari dimensi yang lainnya, Hal ini menandakan bahwa terdapat kelemahan dalam setiap program yang di jalankan Dinas untuk mengidentifikasi seberapa besar resiko yang akan di hadapi. Seperti pada umumnya kasus-kasus SPI terjadi karena pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas. (LHP BPK RI,2011)
2. Pelaksanaan fungsi pemeriksaan intern pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan sudah baik. Artinya bahwa kegiatan fungsi

pemeriksaan yang dilakukan Dinas pada Pemerintah Kota Bandung dilakukan sebagaimana mestinya untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan. Hal ini ditunjukan oleh dimensi perencanaan pemeriksaan, pengujian Informasi dan pengevaluasian Informasi, serta penyampaian hasil pemeriksaan. Sedangkan menurut dimensi tindak lanjut pemeriksaan, dimensi ini mendapatkan kriteria cukup baik dan merupakan dimensi yang memproleh nilai persentase paling rendah dibanding dimensi yang lain. Indikatornya pun, yakni hasil pemeriksaan termasuk kedalam kriteria cukup baik. Hal ini menandakan bahwa hasil tindak lanjut pemeriksaan yang telah diterima oleh Dinas Pemerintah Kota Bandung, belum sepenuhnya dapat berfungsi dengan baik. Hal ini diduga disebabkan oleh beberapa hal, (1) Inspektorat Kota telah memberikan hasil temuan dan rekomendasi, namun baik pemerintah dan jajaran yang dibawahinya belum sepenuhnya melakukan tindaklanjut dari temuan dan rekomendasi yang telah diberikan. (2) Dalam hal ini Dinas di Pemerintah Kota Bandung sedang dalam proses menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang ada, dan memerlukan waktu untuk mengembalikan aset daerah

3. Pelaksanaan kinerja pemerintah daerah pada Dinas Di Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan sudah baik. Artinya, tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program yang tertuang pada perencanaan strategik yang dilakukan oleh Dinas di Pemerintah Kota Bandung sudah dapat dikatakan baik. Hal ini di tunjukan dengan indikator penetapan indikator kinerja, pengembahan sistem penilaian kinerja, penyempurnaan ukuran, dan pengintegrasian dengan proses manajeman. Sedangkan untuk

indikator perencanaan strategik mendaparkan persentase paling rendah. Hal ini menandakan bahwa semua kegiatan/program yang dilakukan belum tentu dapat tercapai sesuai dengan perencanaan strategik yang telah di rencanakan sebelumnya. Kasus ini menjawab fenomena yang terjadi pada kegiatan/program Pemerintah Kota Bandung, yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas yang mana dalam beberapa kasus tidak tercapai dan tidak terealisasinya kegiatan/program yang telah di tetapkan sehingga mempengaruhi kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan programnya.

4. Pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan intern secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung. Artinya semakin baik pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan intern yang dilaksanakan Dinas Pemerintah Daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.
5. Pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung. Artinya semakin baik pengawasan intern dilaksanakan Dinas Pemerintah Daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Besarnya pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah karena pengawasan intern merupakan segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah diterapkan
6. Fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung. Artinya semakin baik fungsi pemeriksaan intern dilaksanakan Dinas Pemerintah Daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Besarnya pengaruh fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah karena fungsi pemeriksaan intern

merupakan pengendalian intern untuk menilai efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi

5.2 Saran-saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Pengawasan Intern dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung) maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Dinas Kota Bandung dan peneliti selanjutnya untuk dapat mencapai optimalisasi pengawasan intern, fungsi pemeriksaan intern dan kinerja pemerintah daerah,yakni sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan dalam kegiatan pengawasan intern pada jajaran instansi pemerintah Kota Bandung, demi meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Bandung dan Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas dalam menjalankan setiap program pemerintah.
2. Tindak lanjut hasil rekomendasi harus selalu dipantau dalam rangka meningkatkan kegiatan fungsi pemeriksaan intern pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung
3. Kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung dalam pencapaian program yang perlu memuat prioritas pembinaan dengan target pencapaiannya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang perlu sehingga target pencapaian suatu program dapat dipenuhi dan dapat meningkatkan kinerja yang telah di capai.
4. Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas, perlu penelitian lanjutan tentang pengaruh pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan intern dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah pada lokasi penelitian yang berbeda.